



PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN

SEKRETARIAT DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21301-Fax. 22070

**RENCANA KERJA
(RENJA)**

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019



TAHUN 2018



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, dan berkat rahmat dan karuniaNYa, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya Sekretariat DPRD mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara Hierakhi Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan Administrasi menunjang tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana Kerja (Renja) ini disusun adalah sebagai pedoman awal atau panduan dari setiap program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD dalam masa 1 (satu) tahun sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun berdasarkan Visi, Misi Kepala Daerah. Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran serta Kebijakan Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Demikian Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD ini dibuat sebagai acuan penyusunan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

Painan, Juli 2018

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PESIR SELATAN



ZULFIAN APRIYANTO, SH, M.SI
NIP. 19651116 198602 1 002



DAFTAR ISI**KATA PENGANTAR**
DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.....	7
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	10
	2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Peningkatan KapasitasKelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	10
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
	3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	11
	3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Lingkungan Hidup Strategis.....	12
	3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	12
	3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	13
	3.5 Program dan Kegiatan.....	13
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V.	PENUTUP	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Cakupan perencanaan pembangunan harus memperhatikan azas integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik dokumen perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah antara pusat dan daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat target kinerja yang hendak dicapai dan indikator-indikator program yang hendak dicapai digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikan dalam program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah merupakan organisasi Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan sebagai salah satu stakeholder kunci di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah dalam



ranka mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah. Hal ini mengacu pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum.

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah ;
 16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Kabupaten dan Kota ;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat ;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun



2019 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 ;
24. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;

1.3 Maksud dan Tujuan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2016-2021;



2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
3. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi sinergi dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan

1.4 Sistematika Penulisan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang
2. Landasan hukum
3. Maksud dan tujuan
4. Sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
4. Review Usulan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah
5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3. Penentuan Isu – Isu Strategis
4. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
5. Program Dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah

Dalam rangka meningkatkan target dan realisasi kinerja program dan kegiatan serta untuk menganalisis perencanaan kebutuhan pada tahun 2019, sangat dibutuhkan evaluasi Renja dengan cara melakukan perbandingan atau membuat sandingan data antara target capaian kinerja Renstra sesuai atau sampai dengan periode akhir Renstra, dibandingkan dengan data realisasi target dan realisasi kinerja hasil program dan kegiatan selama 2 (dua) tahun.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel T-C 29 terlampir:

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah. Untuk pelaksanaan otonomi daerah tersebut, terdapat urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada Daerah, yang selanjutnya menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan non urusan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pembagian urusan berada dalam urusan penunjang yang berkaitan dengan urusan pelayanan dasar dan urusan pilihan Pemerintah Daerah. Dalam kerangka urusan ini Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tugas dan tanggungjawab yang setara dengan perangkat daerah yang masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti Sekretariat Daerah.

Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilihat pada Tabel T-C 30 terlampir

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

- a. Kedudukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.



Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah katagori tipe A yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, telah ditetapkan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2016-2021 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang pencapaiannya akan diukur berdasarkan indikator kinerja sasaran maupun indikator kinerja program. Kedudukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jelas dinyatakan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 dalam hal pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten serta adanya Renstra tersebut, telah membuka peluang untuk melakukan perannya berkaitan dengan isu strategis bidang pelayanan dan fasilitas terhadap fungsi kedewanan sebagai pilar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel (*GOOD GOVERNANCE*).

b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Dilihat dari kedudukan maupun katagori tipe A, saat ini Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tengah menghadapi suatu kondisi lingkungan eksternal yaitu era globalisasi yang sangat cepat, tingkat keterbukaan informasi yang tinggi serta tuntutan pelayanan masyarakat yang cepat, lancar dan murah, sehingga sangat diperlukan pendekatan pengembangan organisasi yang mampu menyesuaikan dengan perubahan maupun perkembangan kondisi lingkungan eksternal.

Permasalahan umum yang muncul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai struktur organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan saat ini adalah keterbatasan jumlah personil yang difungsikan pada masing-masing bidang yang dipimpin oleh pejabat struktural, kondisinya belum merata. Akibat dari kondisi tersebut,



tingkat pengendalian kinerja yang menjadi tanggungjawab para pejabat struktural menjadi kurang mencukupi dalam memicu akselerasi pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Permasalahan pelaksanaan program terkait fungsi pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah :

- Masih belum sempurnanya ketersediaan prasarana penunjang untuk peningkatan pelayanan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap fungsi pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Masih relatif rendahnya pemahaman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan;
- Masih kurangnya konsistensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam melaksanakan tata tertib dan kode etik dewan perwakilan Rakyat Daerah.

c. Peluang dan Tantangan Peningkatan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Peluang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan Visi dan Misinya adalah :

- Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis.
- Semakin besarnya volume kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.
- Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitas.



- Peningkatan pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di masa yang akan datang adalah harus mampu menyelaraskan, menyinkronkan dan harmonisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, sehingga keberadaan teknologi tersebut mampu dimanfaatkan dan menjawab tantangan yang dibutuhkan guna meningkatkan pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai jawaban dalam rangka pelaksanaan pemerintahan di daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2019, dapat dilihat berdasarkan Tabel pada Tabel T-C 31 Terlampir

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penelaahan usulan program dan kegiatan dilakukan berdasarkan usulan yang diperoleh dari pelaksanaan usulan Rencana Kerja (Renja) Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dirancang untuk 1 (satu) Tahun (RKT)



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mengingat tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unit penunjang dan pelayanan administratif maka sasaran program yang tertuang dalam kebijakan Kementerian/Lembaga dan Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Propinsi Sumatera Barat terlaksana dengan baik dan saling melengkapi satu sama lain.

Telaahan kebijakan Nasional dan kebijakan Pemerintah Propinsi dimaksudkan untuk menilai keselarasan, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Kerja OPD Kabupaten Pesisir Selatan terhadap sasaran kebijakan Kementerian/Lembaga dan Kebijakan Pemerintah Propinsi tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten dalam bidang perencanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjalankan tugas dalam bidang Pemerintahan Umum yang lebih khusus mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Dengan kewenangan tersebut, maka penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah yang mencakup proses perencanaan dilakukan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota). Dikarenakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan merupakan lembaga teknis daerah, maka sasaran jangka menengah dari rencana strategis kementerian, provinsi dan kabupaten/kota tidak secara langsung berkaitan. Masing-masing lembaga perencanaan baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota melakukan perencanaan pembangunan dilingkup kewenangannya masing-masing, namun harus sesuai dengan prinsip perencanaan karena merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.



3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010 – 2030, saat ini masih dalam proses revisi/penyelesaian yang dimaksudkan adalah identifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ditinjau dari implikasi RTRW. Mengingat tupoksi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tugas utama terkait dengan tugas menyelenggarakan administrasi umum, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan maka banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh RTRW. Demikian pula yang terkait dengan pengelolaan atau optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga tidak banyak terpengaruh atau mempengaruhi RTRW.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan hak dan fungsinya tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh KLHS. Demikian pula yang terkait dengan pengelolaan atau optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga tidak banyak terpengaruh atau mempengaruhi KLHS. Dalam dokumen KLHS tidak ditemui program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Perencanaan dan penetapan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup yang menjadi keharusan dalam pembangunan daerah perlu dipahami dan ditaati oleh segenap masyarakat sehingga perlu disosialisasikan oleh Dewan secara berkesinambungan agar tata ruang, kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat dikendalikan.

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD hanya ditinjau dari gambaran pelayanan OPD yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain yaitu :

1. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untu mewujudkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



sebagai institusi yang kapabel dibidangnya untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui pemanfaatan **perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**;

2. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

3.4 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan :

1. Mewujudkan manajemen internal (OPD) yang profesional dalam rangka terwujudnya sinergisitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara eksekutif dan legislatif.

Sasaran :

1. Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan.
2. Meningkatnya tata risalah persidangan.
3. Meningkatnya kualitas kehumasan.

3.5 Program Dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran di atas, maka dimunculkanlah 4 (empat) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 18.925.592.000,- (Delapan belas milyar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2020 adalah sebesar Rp. 19.398.732.003,- (Sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga rupiah). Dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif seperti tabel T-C.33 terlampir.

BAB V**PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 adalah merupakan acuan bagi pengembangan dan arah dari seluruh kegiatan perangkat daerah. Dengan Renja ini diharapkan Pimpinan OPD akan menentukan langkah yang berupa kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan sehingga semua kegiatan yang ada di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan akan lebih terarah. Renja ini disusun berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif sebagai bahan acuan dan penilaian serta mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Rencana Kerja ini disusun dengan indikasi penggunaan dana sesuai dengan rencana stategis OPD belum mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga memungkinkan adanya perubahan berkenaan dengan ketersediaan anggaran tahun berkenaan. Demikian penyusunan dokumen perencanaan ini dipergunakan sebagai pedoman operasional untuk menjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergi. Untuk mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat, tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan.

Painan, April 2018



TABEL T-C 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN 2018

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dengan tahun 2016(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018(n-1)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019	
					Target 2017 (n-2)	Realisasi 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program :									
	1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	4	4	8	8	100	6	18	5
	Kegiatan :									
	1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan dan Keputusan yang disahkan	4	4	8	8	100	6	18	5
	2 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan yang dilaksanakan	26	26	14	14	100	26	66	3
	3 Rapat-rapat Paripurna	Jumlah Rapat Paripurna yang dilaksanakan	32	29	35	35	100	29	93	3
	4 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam dan Luar Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan dalam dan luar daerah	11	10	12	10	83	10	30	3
	5 Konsultasi, Koordinasi dan Pembinaan Pimpinan DPRD	Jumlah Konsultasi, Koordinasi dan Pembinaan Pimpinan DPRD yang dilaksanakan	15	75	15	15	100	75	165	11
	6 Konsultasi, Koordinasi dan Pembinaan Alat Kelengkapan DPRD	Jumlah Konsultasi, Koordinasi dan Pembinaan Alat Kelengkapan DPRD yang dilaksanakan dalam dan luar daerah	16	16	5	2	40	16	34	2

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dengan tahun 2016(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018(n-1)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019	
					Target 2017 (n-2)	Realisasi 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	7	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti <i>General Check Up</i>	1	1	1	1	100	1	3	3
	8	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	9	8	6	6	100	8	22	2
	9	Kegiatan Reses	3	3	3	3	100	3	9	3
	10	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama	22	8	22	22	100	8	38	2



TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESIIR SELATAN

No.	Indikator	SPM/standar nasional	No.	IKK	Target Rentra				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)		
1	Jumlah Peraturan dan Keputusan yang disahkan		1.	Jumlah Perda yang dihasilkan	8 perda	6 perda	3 perda	4 perda	8 perda	6 perda	9 kali	13 kali		
2	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan yang dilaksanakan		2.		14 kali	26 kali	4 kali	26 kali	14 kali	26 kali	26 kali	56 kali		
3	Jumlah Rapat Paripurna yang dilaksanakan		3		35kali	29 kali	13 kali	32 kali	35kali	29 kali	29 kali	71 kali		
4	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan dalam dan luar daerah		4		12 kali	10 kali	4 kali	11 kali	10 kali	10 kali	6 kali	24 kali		
5	Jumlah Konsultasi, Koordinasi dan Pembinaan Pimpinan DPRD yang dilaksanakan		5		15 kali	75 kali	42 kali	15 kali	15 kali	75 kali	15 kali	192 kali		
6	Jumlah Konsultasi, Koordinasi dan Pembinaan Alat Kelengkapan DPRD yang dilaksanakan dalam dan luar		6		5 kali	16 kali	10 kali	16 kali	5 kali	16 kali	6 kali	42 kali		
7	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Generat Check Up		7		1 kali	1 kali	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	2 kali		
8	Jumlah Bimtek Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan		8		6 kali	8 kali	4 kali	9 kali	6 kali	8 kali	6 kali	20 kali		
9	Jumlah Reses yang dilaksanakan ke Daerah Pemilihan		9		3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	7 kali		
10	Jumlah Rapat-Rapat, Hearing/Dialog yang dilaksanakan		10		22 kali	8 kali	2 kali	22 kali	22 kali	8 kali	8 kali	18 kali		

Painan, Juli 2018
 Sekretaris DPRD
 Kabupaten Pesisir Selatan

SETWAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

ZULFIAN ABRIYANTO, SH, M.Si
 NIP. 19651116 198602 1 002

TABEL T-C 31
REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

NO.	Rancangan Awal RKP				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rupiah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana Rupiah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Program : L. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Painan	Jumlah Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2.897.023.144	Program : L. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Painan	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100%	2.897.023.144	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Painan	Jumlah Surat Menyurat yang dibayarkan (Bulan)	12 bln	10.120.000	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Painan	Jumlah Surat Menyurat yang dibayarkan (Bulan)	12 bln	10.120.000	
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Painan	Rekening Listrik, Air, Telepon dan Fax (bulan) yang dibayar.	12 bln	229.200.000	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Painan	Rekening Listrik, Air, Telepon dan Fax (bulan) yang dibayar.	12 bln	229.200.000	
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Painan	Jumlah Tenaga pengelola keuangan yang dibayar.	7 org/bln	205.157.386	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Painan	Jumlah Tenaga pengelola keuangan yang dibayar.	12 bln	205.157.386	
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Painan	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Pramu Kantor yang dibayar	7 org/bln	199.150.000	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Painan	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Pramu Kantor yang dibayar	12 bln	199.150.000	
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Painan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibayarkan	12 bln	73.650.719	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Painan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibayarkan	12 bln	73.650.719	
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Painan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan yang dibayarkan	12 bln	17.460.000	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Painan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan yang dibayarkan	12 bln	17.460.000	
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	Painan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor yang dibayarkan	12 bln	44.200.000	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	Painan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor yang dibayarkan	12 bln	44.200.000	
	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Painan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang dibayarkan	7 harian 1 tabloit 8 minggu	156.000.000	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Painan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang dibayarkan	7 harian 1 tabloit 8 minggu	156.000.000	
	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Painan	Jumlah Biaya Jamuan Makanan dan Minuman yang dibayarkan	12 bln	378.800.000	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Painan	Jumlah Biaya Jamuan Makanan dan Minuman yang dibayarkan	12 bln	378.800.000	
	10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Painan	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang diikuti	12 bln	99.200.000	10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Painan	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang diikuti	12 bln	99.200.000	

NO.	Rancangan Awal RPKD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting:				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rupiah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana Rupiah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
	11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Painan	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah yang diikuti	12 bln	72.480.000	11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Painan	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah yang diikuti	12 bln	72.480.000	
	12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Painan	Jumlah jasa Pengamanan Kantor yang dibayarkan	9 org/bln	203.000.000	12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Painan	Jumlah jasa Pengamanan Kantor yang dibayarkan	9 org/bln	203.000.000	
	13	Penyediaan Jasa Publikasi	Painan	Jumlah kegiatan Dewan yang dipublikasikan.	12 bln	1.186.545.697	13	Penyediaan Jasa Publikasi	Painan	Jumlah kegiatan Dewan yang dipublikasikan.	12 bln	1.186.545.697	
	14	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Painan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang dihasilkan	20 Dokumen	22.059.342	14	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Painan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang dihasilkan	20 Dokumen	22.059.342	
	Program :												
	II. Peningkatan sarana & prasarana aparatur												
	Kegiatan :												
	1	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Painan	Jumlah Operasional Kendaraan (Unit)	unit	30.250.000	1	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Painan	Jumlah Operasional Kendaraan (Unit)	unit	30.250.000	
	2	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Painan	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas (Paket)	Paket	70.000.000	2	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas		Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas (Paket)	Paket	70.000.000	
	3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Painan	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (Paket)	Paket	419.600.000	3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (Paket)	Paket	419.600.000	
	4	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Painan	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan / Dinas (Paket)	Paket	7.200.000	4	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Painan	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan / Dinas (Paket)	Paket	7.200.000	
	5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Painan	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Paket)	Paket	240.300.000	5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Paket)	Paket	240.300.000	
	6	Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Jabatan	Painan	Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara	1 unit/thn	51.800.000	6	Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Jabatan	Painan	Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara	1 unit/thn	51.800.000	
	7	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor	Painan	Jumlah gedung Kantor yang dipelihara	2 unit/thn	1.090.550.000	7	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor		Jumlah gedung Kantor yang dipelihara	2 unit/thn	1.090.550.000	
	8	Pemeliharaan rutin/berkala mobil Jabatan	Painan	Jumlah mobil Jabatan yang dipelihara	4 unit	379.882.500	8	Pemeliharaan rutin/berkala mobil Jabatan		Jumlah mobil Jabatan yang dipelihara	4 unit	379.882.500	

NO.	Rancangan Awal RKPDP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rupiah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rupiah	
(1)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional	Painan	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang dipelihara	3 unit mobil 15 unit motor	158.280.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional		Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang dipelihara	3 unit mobil 15 unit motor	158.280.000	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Painan	Jumlah Perengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	1 thn	44.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor		Jumlah Perengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	1 thn	44.000.000	
11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan rumah Jabatan/Dinas	Painan	Jumlah Peralatan rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara	1 thn	32.000.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan rumah Jabatan/Dinas		Jumlah Peralatan rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara	1 thn	32.000.000	
Program :											
III. Peningkatan disiplin aparatur											
		Painan	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	721.800.000	Peningkatan disiplin aparatur	Painan	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	721.800.000	
Kegiatan :											
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Painan	Jumlah pakaian dinas yang disediakan (stel)	255 stel/thn	721.800.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Painan	Jumlah pakaian dinas yang disediakan (stel)	255 stel/thn	721.800.000	
Program :											
IV. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah											
		Painan	Tersedianya Program Untuk Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		12.782.906.554	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Painan	Tersedianya Program Untuk Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		12.782.906.554	
Kegiatan :											
1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Painan	Jumlah Peraturan dan Keputusan yang disahkan	9 Perda	2.639.108.300	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Painan	Jumlah Peraturan dan Keputusan yang disahkan	9 Perda	2.639.108.300	
2	Rapat-rapat-Alat Kelengkapan Dewan	Painan	Rapat-rapat-Alat Kelengkapan Dewan yang dilaksanakan	26 kali/thn	50.606.524	Rapat-rapat-Alat Kelengkapan Dewan	Painan	Rapat-rapat-Alat Kelengkapan Dewan yang dilaksanakan	26 kali/thn	50.606.524	
3	Rapat-rapat Paripurna	Painan	Jumlah Rapat Paripurna yang dilaksanakan	29 kali/thn	146.469.400	Rapat-rapat Paripurna	Painan	Jumlah Rapat Paripurna yang dilaksanakan	29 kali/thn	146.469.400	
4	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam dan Luar Daerah	Painan	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan dalam dan luar daerah	45 org/ 6 kali	2.249.757.497	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam dan Luar Daerah	Painan	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan dalam dan luar daerah	45 org/ 6 kali	2.249.757.497	
5	Konsultasi, Koordinasi dan Pembinaan Pimpinan DPRD	Painan	Jumlah Konsultasi, Koordinasi dan Pembinaan Pimpinan DPRD yang dilak sanakan	4 org/ 15 kali	810.775.730	Konsultasi, Koordinasi dan Pembinaan Pimpinan DPRD	Painan	Jumlah Konsultasi, Koordinasi dan Pembinaan Pimpinan DPRD yang dilak sanakan	4 org/ 15 kali	810.775.730	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rupiah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rupiah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
6	Konsultasi, Koordinasi dan Pembinaan Alat Kelengkapan DPRD	Palinan	Jumlah Konsultasi, Koordinasi dan Pembinaan Alat Kelengkapan DPRD yang dilaksanakan dalam dan luar daerah	6 Alat Kelengkapan/ 6 kali	2.583.012.200	6	Konsultasi, Koordinasi dan Pembinaan Alat Kelengkapan DPRD	Palinan	6 Alat Kelengkapan/ 6 kali	2.583.012.200	
7	General Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	Palinan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti General Check Up	45 org/ 1 kali	207.218.916	7	General Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	Palinan	45 org/ 1 kali	207.218.916	
8	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Palinan	Jumlah Bimtek Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan	45 org/ 6 kali	3.268.641.925	8	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Palinan	45 org/ 6 kali	3.268.641.925	
9	Kegiatan Reses	Palinan	Jumlah Reses yang dilaksanakan ke Daerah Pemilihan	45 org/ 3 kali	779.250.000	9	Kegiatan Reses	Palinan	45 org/ 3 kali	779.250.000	
10	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama	Palinan	Jumlah Rapat-Rapat, Hearing/Dialog yang dilaksanakan	8 kali/ thn	48.066.062	10	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama	Palinan	8 kali/ thn	48.066.062	
					Jumlah	Jumlah					
					18.925.592.198	18.925.592.198					



TABEL T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI KECAMTAN DAN NAGARI KE
DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
	N	I	H	I	L

Painan, April 2018

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



ZULFIAN APRIYANTO, SH, M.SI
NIP. 19651116 198602 1002

TABEL T-C 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rupiah	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rupiah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	1. Program :									
	Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Painan	100%	2.897.023.144	APBD		100%	2.969.448.723	
	Kegiatan :									
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang dibayarkan (Bulan)	Painan	12 bln	10.120.000	APBD		12 bln	10.373.000	
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Rekening Listrik, Air, Telepon dan Fax (bulan) yang dibayar.	Painan	12 bln	229.200.000	APBD		12 bln	234.930.000	
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga pengelola keuangan yang dibayar.	Painan	7 org/bln	205.157.386	APBD		7 org/bln	210.286.321	
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Pramu Kantor yang dibayar	Painan	7 org/bln	199.150.000	APBD		7 org/bln	204.128.750	
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibayarkan	Painan	12 bln	73.650.719	APBD		12 bln	75.491.987	
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan pengandaan yang dibayarkan	Painan	12 bln	17.460.000	APBD		12 bln	17.896.500	
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor yang dibayarkan	Painan	12 bln	44.200.000	APBD		12 bln	45.305.000	

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rupiah	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rupiah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang dibayarkan	Painan	7 harian 1 tabloit 8 mingguan	156.000.000	APBD		7 harian 1 tabloit 8 mingguan	159.900.000	
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Biaya Jamuan Makanan dan Minuman Yang dibayarkan	Painan	12 bln	378.800.000	APBD		12 bln	388.270.000	
	10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang diikuti	Painan	12 bln	99.200.000	APBD		12 bln	101.680.000	
	11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah yang diikuti	Painan	12 bln	72.480.000	APBD		12 bln	74.292.000	
	12. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Jasa Pengamanan Kantor yang dibayarkan	Painan	9 org/bln	203.000.000	APBD		9 org/bln	208.075.000	
	13. Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah kegiatan Dewan yang dipublikasikan.	Painan	12 bln	1.186.545.697	APBD		12 bln	1.216.209.339	
	14. Penujang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang dihasilkan	Painan	20 Dokumen	22.059.342	APBD		20 Dokumen	22.610.826	
	II. Program :									
	Peningkatan sarana & prasarana aparatur	Meningkatnya Kecukupan Sarana dan Prasarana Aparatur (Persentasi)	Painan	100%	2.523.862.500	APBD		100%	2.586.959.063	
	Kegiatan :									
	1. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Operasional Kendaraan (Unit)	Painan	unit	30.250.000	APBD		unit	31.006.250	
	2. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas (Paket)	Painan	Paket	70.000.000	APBD		Paket	71.750.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rupiah	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rupiah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan (Stel)	Painan	255 stel/thn	721.800.000	APBD		255 stel	739.845.000	
	IV. Program :									
	Peningkatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Painan	100%	12.782.906.554	APBD		100%	13.102.479.218	
	Kegiatan :									
	1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan dan Keputusan yang disahkan	Painan	9 Perda	2.639.108.300	APBD		9 Perda	2.705.086.008	
	2. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan yang dilaksanakan	Painan	26 kali/thn	50.606.524	APBD		26 kali/thn	51.871.687	
	3. Rapat-rapat Paripurna	Jumlah Rapat Paripurna yang dilaksanakan	Painan	29 kali/thn	146.469.400	APBD		29 kali/thn	150.131.135	
	4. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam dan Luar Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan dalam dan luar daerah	Painan	45 org/ 6 kali	2.249.757.497	APBD		45 org/ 6 kali	2.306.001.434	
	5. Konsultasi, Koordinasi dan Pembinaan Pimpinan DPRD	Jumlah Konsultasi, Koordinasi dan Pembinaan Pimpinan DPRD yang dilak sanakan	Painan	4 org/ 15 kali	810.775.730	APBD		4 org/ 15 kali	831.045.123	
	6. Konsultasi, Koordinasi dan Pembinaan Alat Kelengkapan DPRD	Jumlah Konsultasi, Koordinasi dan Pembinaan Alat Kelengkapan DPRD yang dilaksanakan dalam dan luar daerah	Painan	6 Alat Kelengkapan/ 6 kali	2.583.012.200	APBD		6 Alat Kelengkapan/ 6 kali	2.647.587.505	
	7. General Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti <i>General Check Up</i>	Painan	45 org/ 1 kali	207.218.916	APBD		45 org/ 1 kali	212.399.389	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rupiah		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rupiah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	8. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Bimtek Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan	Painan	45 org/ 6 kali	3.268.641.925	APBD		45 org/ 6 kali	3.350.357.973	
	9. Kegiatan Reses	Jumlah Reses yang dilaksanakan ke Daerah Pemilihan	Painan	45 org/ 3 kali	779.250.000	APBD		45 org/ 3 kali	798.731.250	
	10. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama	Jumlah Rapat-Rapat, Hearing/Dialog yang dilaksanakan	Painan	8 kali/ thn	48.066.062	APBD		8 kali/ thn	49.267.714	
	J U M L A H					18.925.592.198			19.398.732.003	

